

Wisata Minat Khusus : Pengelolaan Objek Wisata Pendakian di Gunung Marapi (2016-2022)

Mario Resandi¹, Najmi²

^{1,2}Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

*marioresandi@gmail.com

ABSTRACT

This research is a historical study that discusses the management of the Mount Marapi climbing tourist attraction from 2016-2022. The aim of this research is to (1) Describe the management of the climbing tourist attraction on the Koto Baru route in the Mount Marapi Natural Tourism Park by Pokdarwis Koto Baru from 2016-2021 (2) Describe the management of the climbing tourist attraction on Mount Marapi by the West Sumatra Natural Resources Conservation Center in 2016-2021. 2022. This research uses historical methods with the following steps: Heuristics or data collection from the Natural Resources Conservation Center and the Koto Baru Tourism Awareness Group such as archives from each management and interviews with the head of the Bukitltinggil KSDA rail resort, the guard of the Gilstrasil rail post entering the mountain TWA area Marapil, Selkrehtarils Kellompok Sadar Wilsata Batu Palano and Keltua of the Sadar Wilsata Koto Baru group. After the data is obtained, the source is criticized using external criticism and internal criticism, then it is continued by interpreting the data obtained by sorting or distinguishing related facts so that information is found whose truth has been tested through source criticism so that this research can be completed. The final stage is writing history or historiography by combining facts that are independent of each other so that they become a systematic combination in the form of a chronological narrative. The results of this research show that there are differences in the management of tourist attractions by each management between the Koto national tourism awareness groups. New with the West Sumatra Natural Resources Conservation Center. A very significant difference is in the registration system for climbers. At the time the Pokdarwis management used manual methods, while the West Sumatra Natural Resources Conservation Center implemented an online system to make it easier for climbers to register and facilitate the visitor data collection process. Regulations and provision of facilities have also been improved in the BKSDA management by adding new rules and additional facilities to support the safety of climbers.

Keywords: Management, Tourist Attractions, Mountain Climbing

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian sejarah yang membahas tentang pengelolaan objek wisata pendakian gunung Marapi dari tahun 2016-2022. Tujuan penelitian ini untuk (1) Mendeskripsikan pengelolaan objek wisata pendakian jalur Koto Baru di Taman Wisata Alam gunung Marapi oleh Pokdarwis Koto Baru dari tahun 2016-2021 (2) Mendeskripsikan pengelolaan objek wisata pendakian di gunung Marapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah: Heuristik atau pengumpulan data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelompok Sadar Wisata Koto Baru seperti arsip dari masing-masing kepengurusan dan wawancara dengan kepala resort KSDA Bukittinggi,

penjaga posko registrasi masuk kawasan TWA gunung Marapi, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Batu Palano dan Ketua kelompok Sadar Wisata Koto Baru. Setelah data didapatkan kemudian dikritik sumber menggunakan kritik eksternal dan kritik internal kemudian dilanjutkan dengan menginterpretasikan data yang didapat dengan cara memilah-milah atau membedakan fakta yang berkaitan sehingga ditemukan butir-butir informasi yang kebenarannya yang telah diuji melalui kritik sumber sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tahap akhir adalah penulisan sejarah atau historiografi dengan menyatukan fakta- fakta yang terlepas satu sama lain sehingga menjadi suatu perpaduan yang sistematis dalam bentuk narasi kronologi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pengelolaan objek wisata oleh masing-masing kepengurusan antara kelompok sadar wisata kenagarian Koto Baru dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat. Perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada sistem registrasi untuk para pendaki. Pada saat kepengurusan Pokdarwis menggunakan cara manual sedangkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menerapkan sistem online untuk memudahkan para pendaki dalam melakukan pendaftaran serta memudahkan proses pendataan pengunjung. Peraturan dan pengadaan fasilitas juga lebih di tingkatkan pada kepengurusan BKSDA dengan menambah aturan- aturan baru serta penambahan fasilitas untuk menunjang keselamatan para pendaki.

Kata Kunci : Pengelolaan, Objek Wisata, Pendakian Gunung

PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan manusia terhadap pariwisata telah melahirkan berbagai jenis kegiatan wisata, dari wisata massal sampai pada bentuk wisata minat khusus yang memiliki fokus kegiatan yang lebih spesifik dan menekankan kepada aspek penghayatan dan penghargaan lebih terhadap kelestarian alam, keindahan lingkungan dan pesona budaya. Wisata minat khusus telah menjadi tren pariwisata saat ini dimana wisata minat khusus ini dilakukan untuk menghindari pariwisata massal dengan kata lain wisata minat khusus adalah salah satu alternatif pariwisata. Wisata minat khusus yang menjadi fenomena baru di dunia pariwisata menjadi salah satu tuntutan bagi para penyedia jasa wisata. Motivasi wisatawan dalam mencari sesuatu yang baru dan mempunyai pengalaman wisata yang berkualitas menyebabkan meningkatnya permintaan bagi wisatawan minat khusus. Wisata minat khusus mempunyai kaitan dengan kegiatan fisik, serta dilakukan di ruang bebas seperti mendaki gunung, menyelam, susur sungai, panjat tebing, serta susur goa (Mutaqin, 2020).

Wisata minat khusus dikembangkan dalam upaya pengoptimalan sumber daya untuk memajukan sektor pariwisata di daerah tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang memaparkan bahwa perusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata (Sancahyo, 2021)

Provinsi Sumatera Barat terdapat wisata pendakian gunung yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi yang terletak di kabupaten Agam yang langsung dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat terhitung dari Oktober

2022. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat pada tahun 2019 melakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi pemanfaatan kawasan konservasi tepatnya di TWA Gunung Marapi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.599/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 kawasan TWA Gunung Marapi ditetapkan fungsinya dalam fungsi pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Taman Wisata Alam Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, artinya gunung Marapi secara resmi bisa di peruntukkan sebagai objek wisata. Dengan adanya keputusan tersebut BKSDA memanfaatkan hal tersebut agar adanya pengelolaan objek wisata yang terorganisir dengan membentuk Pokdarwis Koto Baru. BKSDA membentuk kerjasama berbasis program kemitraan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk usaha peningkatan hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan peningkatan ekonomi masyarakat daerah peyangga kawasan konservasi. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi didalam kawasan konservasi dimaksudkan untuk melakukan pendataan sekaligus melakukan *groundcheck* terhadap lokasi-lokasi yang sudah dimanfaatkan masyarakat salah satunya untuk wisata minat khusus dalam bentuk kegiatan pendakian dimasing-masing daerah kawasan TWA gunung Marapi (Jusmar, 2019).

Ada 4 jalur pendakian di TWA Gunung Marapi yaitu jalur pendakian via Koto Baru, Batu Palano, Aia Angek, dan Pariangan. Masing- masing jalur pendakian ini dikelola oleh Pokdarwis daerah setempat sesuai dengan letak jalur pendakiannya. Untuk jalur pendakian via Koto Baru merupakan jalur yang paling populer dan sering di lalui para pendaki. Jalur pendakian ini dikelola oleh Pokdarwis Koto Baru sejak tahun 2016 saat di bentuknya keorganisasian Pokdarwis tersebut. Sebelum tahun 2016 wisata mendaki jalur Koto Baru ini dikelola oleh masyarakat lokal dan pemuda setempat dengan perizinan dari kelurahan tanpa adanya kerjasama berbasis program kemitraan dengan pihak BKSDA provinsi Sumatera Barat serta sistem atau kelembagaan yang jelas dalam pengelolaan objek wisata. Hal tersebut dibiarkan oleh pihak BKSDA dengan pertimbangan untuk menghindari konflik dengan masyarakat lokal (V.Ciko, 2022).

Pada tahun 2016, saat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.599/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2016 dikeluarkan, pihak BKSDA membentuk kelembagaan Pokdarwis Koto Baru untuk mengelola objek wisata mendaki di gunung Marapi khusus jalur pendakian Koto Baru. BKSDA Sumatera Barat membina dan memberikan bimbingan serta pelatihan kepada Pokdarwis dalam mengelola objek wisata. Langkah awal yang dilakukan Pokdarwis pada awal terbentuk yaitu dengan membentuk struktur keanggotaan seperti menetapkan ketua, wakil, sekretaris, serta bendahara. Pokdarwis memilih pemuda kenagarian Koto Baru sebagai anggota keorganisasian yang sebelumnya pernah terlibat dalam pengelolaan objek wisata ini saat masih di kelola oleh masyarakat lokal. Pokdarwis juga merenovasi fasilitas-fasilitas yang telah ada seperti posko registrasi, wc dan mushala.

Pada April 2020, wisata pendakian gunung Marapi di tutup karena adanya pandemi. Pemerintah melarang seluruh bentuk kegiatan pendakian di gunung Marapi dan

kembali di buka pada Juni 2020. Pada Oktober 2020 terjadi konflik antara Pokdarwis Koto Baru dengan masyarakat Batu Palano, dimana masyarakat batu Palano mengalami kecemburuan sosial karena merasa Pokdarwis Koto Baru diuntungkan dengan adanya pemungutan registrasi masuk jalur pendakian, yang sejak tahun 2016 tidak pernah di permasalahakan oleh masyarakat Batu Palano. Masyarakat Batu Palano lalu mendirikan posko registrasi di area pesanggrahan yang dimana area tersebut bisa di masuki melalui jalur Koto Baru dan Batu Palano. Jadi para pendaki membayar dua kali biaya retribusi. Pemungutan yang dilakukan pihak Batu Palano tersebut di dilakukan secara sepihak dan uang hasil pemungutan tersebut pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa adanya timbal balik yang didapatkan pendaki. Pada bulan oktober tahun 2022 TWA Gunung Marapi mengambil alih pengelolaan objek wisata pendakian gunung Marapi dan memberikan nama baru untuk jalur pendakian yaitu Jalur pendakian Proklamator (R. Idrianto, 2022).

Sejumlah karya yang terkait dengan penelitian ini ialah hasil penelitian Himsar Hutabarat dan Gusti Agung Oka Mahagangga tahun 2019 yang berjudul “Perekembangan Wisata Mendaki di Gunung Agung : Studi Kasus Gunung Agung Kabupaten Karangasem Provinsi Bali”(Hutabarat, 2019). Penelitian ini membahas tentang Perkembangan Wisata Mendaki di Gunung Agung. Penelitian ini membahas mengenai tahap tahap perkembangan dari wisata pendakian gunung Agung seperti contoh dalam tahap pelembagaan dimana masyarakat desa Selat mendirikan badan mandiri berupa jasa wisata mendaki yang hal tersebut dilakukan guna menunjang perubahan dalam pengelolaan objek wisata yang lebih baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai perkembangan objek wisata pendakian gunung terutama dari segi pengelolaan serta fasilitas objek wisata. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya membahas mengenai perkembangan wisata mendaki di gunung Agung tetapi juga mencakup studi kasus mengenai gunung Agung serta mengkaji potensi wisata selain wisata pendakian.

Hasil Penelitian Alip Fatimah tahun 2017 yang berjudul “Potensi Wisata Minat Khusus di Jalur Pendakian Sapuagin Taman Nasional Gunung Merapi Tegalmulyo Kemalang Klaten”(Fatimah, 2017). Penelitian membahas mengenai pengelolaan serta pelayanan pihak pengelola objek wisata pendakian dimana sudah memiliki perencanaan serta pengorganisasian seperti tersedianya *basecamp* pendakian dan penyewaan alat pendakian. Dalam hal prasarana pihak pengelola sudah menyediakan area parkir, peta jalur pendakian, serta plang penunjuk arah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan sebuah objek wisata pendakian gunung sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas potensi wisata minat khusus selain pendakian gunung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan sebuah objek wisata pendakian gunung sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas potensi wisata minat khusus selain pendakian gunung

Selanjutnya Hasil Penelitian Sapardi, Endry Martius, dan Erwin pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Dampak Pengelolaan Wisata Minat Khusus Terhadap Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Nagari Air Batumbuk Kabupaten Solok : Studi Kasus

Objek Pendakian Gunung Talang Melalui Jalur Air Batumbuk” (Sapardi, 2021). Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan wisata minat khusus objek pendakian gunung Talang melalui jalur Air Batumbuk. Pengelolaan secara inklusif ditandai dengan besarnya peran dan keterlibatan masyarakat sekitar objek wisata, terutama oleh Pokdarwis dengan mengadakan pembangunan fasilitas untuk para pendaki seperti pendirian shelter dan pemeliharaan jalur pendakian agar terus bisa di lalui. Pengelolaan serta promosi objek wisata yang di lakukan Pokdarwis sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan berdampak terhadap perekonomian masyarakat dengan bertambahnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat seperti berjualan, rental alat pendakian, porter, dan pemandu wisata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana sebuah pengelolaan objek wisata minat khusus pendakian gunung sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga mengkaji bagaimana dampak pengelolaan tersebut terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Selanjutnya Hasil Penelitian Indan Rahmatun Humaini pada tahun 2021 yang berjudul “ Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Alam Gunung Sasak Sebagai Aset Wisata Desa Kuripan”(Humaini, 2021). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana manajemen pihak pengelola wisata alam gunung Sasak mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Pembahasan selanjutnya mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan wisata alam ini mulai dari membangun sarana dan prasarana, mempromosikan objek wisata, dan pemberdayaan masyarakat setempat agar keberadaan objek wisata ini dapat dirasakan manfaatnya. Selanjutnya membahas mengenai apa saja kendala yang dihadapi pihak pengelola dalam mengelola objek wisata seperti adanya keterbatasan dana dalam pengadaan fasilitas, serta belum peningkatan arus kunjungan wisatawan karena kurangnya promosi objek wisata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama- sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan sebuah objek wisata pendakian gunung sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini juga membahas mengenai potensi wisata alam selain pendakian gunung.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yakni ada empat langkah-langkah tahap penulisan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan selanjutnya historiografi. Pada tahap pertama, heuristik atau pengumpulan data yang dilakukakn dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer yang ada pada penelitian ini adalah data arsip yang diperoleh dari Kelompok Sadar Wisata di kawasan TWA gunung Marapi sedangkan sumber primer lisan adalah melalui wawancara dengan kepala resort KSDA Bukittinggi, penjaga posko registrasi masuk kawasan TWA gunung Marapi, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Batu Palano dan Ketua kelompok Sadar Wisata Koto Baru. Data sekunder yang penulis gunakan melalui penelitian terdahulu dan kepustakaan dengan cara memahami jurnal-jurnal dan buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan pengelolaan objek wisata pendakian gunung. Sumber tersebut diperoleh dengan cara mencari tema yang terkait judul penelitian di perpustakaan perpustakaan

Univertas Negeri Padang, Perpustakaan FIS UNP, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan IPUSNAS (perpustakaan online) serta mengumpulkan data dari jurnal dan artikel yang terkait.

Selanjutnya tahap kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk pengolahan data atau analisis data baik sumber tertulis maupun lisan yang diuji melalui serangkaian kritik internal dan eksternal. Dalam melakukan kritik eksternal terhadap sumber-sumber tertulis, penulis memperhatikan aspek akademis dari penulis buku yaitu dengan melihat latar belakang penulis buku tersebut untuk melihat intensitasnya, penulis berkesimpulan bahwa sumber literatur tersebut merupakan sumber tertulis yang dapat digunakan. Penulis melakukan kritik eksternal terhadap sumber lisan yang dilakukan dengan mengidentifikasi narasumber dengan cara melihat faktor usia, perilaku dalam arti apakah narasumber mengatakan yang sebenarnya. Kritik internal untuk sumber lisan, penulis melakukan kaji banding terhadap hasil wawancara narasumber yang satu dengan yang lainnya karena tidak semua orang memiliki pandangan yang sama terhadap permasalahan. Jika kebanyakan isinya seragam, maka penulis dapat menyimpulkan apa yang dikatakan narasumber. Hal ini untuk mencari kecocokan diantara narasumber dan untuk meminimalisir subjektivitas narasumber tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dengan teori disusun fakta-fakta tersebut dalam suatu interpretasi menyeluruh. Terakhir adalah tahap historiografi yaitu penulisan atau memaparkan hasil penelitian tentang pengelolaan objek wisata pendakian gunung Marapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Gunung Marapi Sebagai Objek Wisata Alam Dalam Tinjauan Sejarah

Sebelum di bentuknya Pokdarwis masyarakat nagari Koto Baru yang mengelola tanpa regulasi yang ditetapkan secara bersama- sama dengan pihak BKSDA, dengan anggapan bahwa gunung ini milik masyarakat Koto Baru dan kami masyarkat yang membuka jalur pendakian ini, keberadaan jalur pendakian gunung Marapi via Koto Baru dipertahankan dengan adanya peraturan adat setempat yang ditaati oleh masyarakat sekitar secara turun temurun. karena mengatur penggunaan tanah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tanah ini dalam adat disebut sebagai tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan segala sesuatu yang teradapat atau yang ada di atas tanah termasuk ruang angkasa maupun segala hasil perut bumi diwarisi secara turun temurun mulai dari nenek moyang hingga kepada generasi selanjutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi (Nurullah, 1999). Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan adat saja tidak cukup untuk melestarikan kawasan TWA Gunung Marapi yang terus ramai dikunjungi para pecinta kegiatan alam bebas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini diperparah dengan pengelolaan jalur pendakian yang tidak jelas secara administrasi yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam penarikan uang registrasi masuk kawasan wisata, selain itu bantuan yang didapatkan pendaki ketika mengalami kecelakaan saat pendakian juga cukup minim karena pengelolaannya masih semrawut, yang membuat masalah di jalur pendakian semakin rumit. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 2016 dengan akhirnya

dibentuklah Pokdarwis Koto Baru agar pengelolaan objek wisata pendakian lebih jelas dan tidak adanya konflik yang terjadi antara pihak BKSDA dengan masyarakat setempat.

Pengelolaan objek wisata pendakian oleh Pokdarwis Koto Baru Tahun 2016-2021

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan lembaga di tingkat masyarakat yang dibentuk sebagai penggerak, penanggung jawab, dan pengelola pariwisata di kawasan wisata. Kelompok ini dibentuk untuk mendukung terciptanya pertumbuhan dan perkembangan pariwisata serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Perkembangan pariwisata di daerah tergantung pada pengelolaan pariwisata di daerah tersebut sehingga disini masyarakat dituntut untuk memanfaatkan pariwisata yang ada guna meningkatkan kesempatan kerja di daerah tersebut, sehingga keberadaannya menjadi berkah bagi masyarakat sekitar dan menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di daerah yang memiliki potensi wisata (Rachman, 2022). Pokdarwis Koto Baru merupakan kelompok sadar wisata yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat di kanagarian Koto Baru sendiri, mulai dari pemuda setempat hingga pemangku kepentingan daerah setempat. Pokdarwis Koto Baru di bentuk oleh BKSDA Sumatera Barat atas dasar pengelolaan objek wisata yang lebih terorganisir

Objek wisata pendakian jalur Koto Baru sebelum di bentuknya Pokdarwis, masyarakat nagari Koto Baru yang mengelola tanpa regulasi yang ditetapkan secara bersama- sama dengan pihak BKSDA, dengan anggapan bahwa gunung ini milik masyarakat Koto Baru dan kami masyarkat yang membuka jalur pendakian ini. Sebelum di bentuknya Pokdarwis, keberadaan jalur pendakian gunung Marapi via Koto Baru dipertahankan dengan adanya peraturan adat setempat yang ditaati oleh masyarakat sekitar secara turun temurun. karena mengatur penggunaan tanah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tanah ini dalam adat disebut sebagai tanah ulayat. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan adat saja tidak cukup untuk melestarikan kawasan TWA Gunung Marapi yang terus ramai dikunjungi para pecinta kegiatan alam bebas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini diperparah dengan pengelolaan jalur pendakian yang tidak jelas secara administrasi yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam penarikan uang registrasi masuk kawasan wisata, selain itu bantuan yang didapatkan pendaki ketika mengalami kecelakaan saat pendakian juga cukup minim karena pengelolaannya masih tidak ada kejelasan, yang membuat masalah di jalur pendakian semakin rumit. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 2016 dengan akhirnya dibentuklah Pokdarwis Koto Baru divisi wisata alam yang mengurus perihal objek wisata pendakian agar pengelolaan objek wisata pendakian lebih jelas dan tidak adanya konflik yang terjadi antara pihak BKSDA dengan masyarakat setempat nantinya.

Tabel 1.1 Struktur Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Koto Baru Kecamatan X Koto Divisi Wisata Alam Tahun 2016-2021

No	Nama	Jabatan
1	Hendra Gucciano	Ketua
2	Irwansyah	Wakil Ketua
3	Andre Fadli	Sekretaris
4	Salsa Nabila Putri	Bendahara
5	Erwin Saputra	Anggota
6	Tony Rizki	Anggota
7	Rahmat Hidayatullah Syah	Anggota
8	Hendra	Anggota
9	Ade Ardian	Anggota
10	Andika	Anggota
11	Saddam Husein	Anggota
12	Zul	Anggota
13	Ilham	Anggota
14	Bayu	Anggota
15	Jay	Anggota
16	Zulkifili	Anggota

Sumber: (Arsip Kelompok Sadar Wisata Koto Baru, 2021)

Setelah dibentuknya kelompok tersebut, BKSDA memberikan binaan serta pelatihan agar nantinya pengelolaan objek wisata ini sesuai dengan fungsi pokok pemanfaatan kawasan konservasi khususnya Taman Wisata Alam. BKSDA Sumatera Barat memberikan pembinaan kepada Pokdarwis Koto Baru untuk menjelaskan bagaimana prinsip pengelolaan kawasan oleh masyarakat sekitar kawasan BKSDA serta pelatihan agar nantinya pengelolaan objek wisata ini sesuai dengan fungsi pokok pemanfaatan kawasan konservasi khususnya Taman Wisata Alam yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi alam. Kegiatan yang dapat dilakukan di Taman Wisata Alam adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam. Kegiatan- kegiatan tersebut harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok kawasan.

Pokdarwis Koto Baru merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang berasal dari masyarakat yang tentunya memiliki peran strategis dalam mengembangkan serta mengelola potensi kekayaan alam maupun budaya yang dimiliki Nagari Koto Baru untuk menjadi daerah tujuan wisata, khususnya yaitu TWA Gunung Marapi. Kegiatan pembinaan dilakukan dengan tujuan agar masyarakat bisa berusaha di TWA Gunung Marapi sesuai dengan peraturan tentang pengusaha pariwisata alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yaitu berupa Ijin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Ijin Usaha Penyediaan Jasa

Wisata Alam (IUPJWA). IUPJWA.

Dalam mengelola objek wisata Pokdarwis mulai merenovasi semua fasilitas yang memang sudah ada pada saat objek wisata dikelola oleh masyarakat lokal seperti contoh posko registrasi pendakian gunung Marapi yang dimana telah ada sejak tahun 2011, pada saat wiata pendakian masih di kelola oleh masyarakat setempat. Renovasi shelter pendakian juga di lakukan sepanjang jalur pendakian dan serta memberi petunjuk arah untuk jalur pendakian sekaligus petunjuk arah untuk sumber mata air guna memudahkan pendaki yang akan mendaki melalui jalur Koto Baru. Selain Pokdarwis juga merenovasi toilet umum. Kegiatan Renovasi tersebut di lakukan sebagai langkah awal pengelolaan objek wisata yang lebih baik serta bentuk pemanfaatan uang retribusi dari para pendaki sebagaimana mestinya. Untuk kegiatan rutusnya Pokdarwis Koto Baru juga melakukan kegiatan aksi bersih (Sapu Jagat) yang di lakukan bersama- sama dengan masyarakat lokal serta komunitas pendaki gunung Sumatera Barat. Aksi bersih di lakukan mulai dari pintu masuk sampai dengan area camp tepatnya area cadas.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Aksi Bersih Jalur Pendakian oleh Pokdarwis Koto Baru 2016-2021

No	Tahun	Aksi Bersih
1	2016	4
2	2017	6
3	2018	9
4	2019	12
5	2020	2
6	2021	3

Sumber: (Arsip Kelompok Sadar Wisata Koto Baru, 2021)

Kegiatan aksi bersih ini merupakan agenda wajib yang telah ditetapkan Pokdarwis Koto Baru untuk menjaga agar kelestarian gunung tetap terjaga baik dari sampah, vandalism maupun benda lain yang mengganggu keamanan dan kenyamanan para pendaki. Selain itu, aksi bersih juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata ini terhadap kelestarian gunung Marapi. Pada tahun 2020 dan 2021 saat objek wisata pendakian ditutup karena pandemi, pihak pengelola terutama Pokdarwis tetap melakukan aksi bersih dengan tujuan untuk membersihkan jalur pendakian dari pohon-pohon tumbang yang menutup jalur atau menghambat jalur pendakian.

Pokdarwis juga menetapkan biaya registrasi untuk masuk kawasan objek wisata pendakian di gunung Marapi sebesar Rp.10.000/orang, adapun untuk biaya parkir sebesar Rp.5.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp.15.000 untuk kendaraan roda empat yang dihitung per hari. Pokdarwis Koto Baru menetapkan aturan-aturan untuk para pendaki antara lain; (1) Sebelum melakukan pendakian para pendaki wajib melakukan registrasi atau pendataan identitas diri di posko pendakian gunung Marapi dan melapor kembali setelah melakukan pendakian. (2) Pendaki diwajibkan membawa perlengkapan pendakian

seperti *sleeping bag*, sepatu tracking, senter, *carrier* dan perlengkapan dasar lain untuk pendakian. (3) Pendaki dilarang berada atau melewati batas yang dibolehkan untuk didaki demi keselamatan mengingat Marapi berstatus waspada (level II) sehingga dilarang beraktivitas pada radius tiga kilometer dari kawah atau puncak. (4) Pendaki dilarang memetik, mengambil, dan merusak flora di area wisata pendakian gunung Marapi. (5) Pendaki dilarang membuang sampah di area kawasan wisata pendakian gunung Marapi.

Pihak Pokdarwis juga mempertegas aturan tersebut apabila melanggar akan masuk daftar hitam dengan kata lain pelanggar tersebut tidak diperbolehkan mendaki gunung Marapi untuk beberapa waktu yang telah ditentukan serta akan dikenakan sanksi pidana. Adapun aturan khusus yang diterapkan saat hari-hari tertentu seperti penyambutan hari tahun baru dan kemerdekaan yaitu pendaki dilarang membawa kembang api serta alat music seperti gitar pada saat mendaki ke gunung Marapi.

Jalur paling ramai dilalui oleh para pendaki untuk mendaki gunung Marapi adalah jalur pendakian via Koto Baru, yang selama ini pengelola poskonya adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Koto Baru. Pada tahun 2020 Posko Pokdarwis Koto Baru mengalami konflik dengan masyarakat Batu Palano. Masyarakat batu Palano mengalami "kecemburuan sosial" karena merasa Pokdarwis Koto Baru diuntungkan dengan adanya pemungutan registrasi masuk jalur pendakian, yang sejak tahun 2016 tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat Batu Palano. Masyarakat Batu Palano mendirikan posko registrasi di kawasan tempat para pendaki camping ground (Tempat para pendaki berkemah sebelum melakukan pendakian menuju puncak) tanpa adanya persetujuan dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat. Jadi para pendaki membayar dua kali biaya registrasi. Pemungutan yang dilakukan pihak Batu Palano tersebut dilakukan secara sepihak dan uang hasil pemungutan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tanpa adanya timbal balik yang didapatkan pendaki. Selain konflik tersebut masalah lain dalam pengelolaan TWA alam gunung Marapi ini adalah shelter untuk berlindung para pendaki gunung Marapi jalur Koto Baru diambil alih sepihak oleh warga setempat untuk kepentingan pribadi, seperti tempat untuk berjualan. tersebut.

Pengelolaan objek wisata pendakian oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat Tahun 2022

Pada Oktober 2022 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat mengambil alih kepengurusan objek wisata pendakian yang sebelumnya dikelola oleh Pokdarwis Koto Baru dari tahun 2016-2021. Peralihan kepengurusan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang terjadi selama periode kepengurusan Pokdarwis Koto Baru yang berimbas kacaunya pengelolaan objek wisata. BKSDA juga menamai jalur pendakian dengan sebutan jalur pendakian proklamator. Penamaan ini dipilih untuk menghormati sang proklamator bung hatta yang pernah mendirikan pesanggrahan sebagai persembunyian pada masa-masa genting kemerdekaan. Penamaan ini menjadi daya tarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung terbukti selama rentang tahun 2022 ada 150 wisatawan dari Malaysia yang melakukan pendakian ke gunung Marapi. Peralihan

kepengurusan dapat dilakukan berkat dukungan dan kesepakatan bersama ninik mamak dari lima nagari yang terlibat, yaitu Batu Palano, Koto Baru, Aia Angek, Pariangan dan Koto Rintang. Setelah peluncuran jalur Proklamator, pendaki tidak diperbolehkan mendaki di malam hari, menetapkan kuota pendaki, serta membatasi izin pendakian yang diberikan selama dua hari saja. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pendaki, memberikan waktu bagi alam untuk pemulihan, serta mendorong pergerakan ekonomi masyarakat setempat. Khususnya dengan menyediakan jasa antar jemput pendaki maupun homestay (Zahira, 2022).

Dibukanya jalur pendakian Proklamator ini menandai bahwa dimulainya sistem baru dalam pengelolaan wisata pendakian gunung Marapi yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat tanpa melibatkan lagi kontribusi dari kelompok sadar wisata setempat, hal tersebut bertujuan agar sebuah wisata pendakian menjadi lebih tertata dengan di dukung sarana prasarana yang memadai sesuai dengan SOP yang telah menjadi acuan bagi wisata pendakian skala nasional. BKSDA Sumatera Barat juga menerapkan sistem kuota pendakian yaitu batasan atau jumlah pendaki yang diperbolehkan untuk melakukan pendakian di TWA Gunung Marapi.

Dalam rangka melakukan pelayanan prima kepada pengunjung dan mewujudkan pengelolaan ekowisata yang profesional, efektif dan efisien dalam hal pengelolaan ekowisata BKSDA juga menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan pengelolaannya. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendakian Gunung Marapi di berlakukan pada Desember 2022 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan ketertiban pendaki serta menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem gunung Marapi dan sebagai pedoman atau aturan pelaksanaan/penyelenggaraan pendakian di TWA gunung Marapi. Ruang Lingkup SOP pendakian gunung Marapi ini meliputi arahan teknis, prosedur pendakian (ketentuan umum, kewajiban pendaki, larangan bagi pendaki), tahapan pendakian dan sanksi. Pemberlakuan SOP ini terbilang berjalan dengan baik, terbukti pada tahun 2022 tidak adanya kasus kecelakaan pendaki di gunung Marapi.

TWA Gunung Marapi sangat populer bagi kelompok pendaki dan pecinta alam di Sumatera Barat. Namun, aktivitas pendakian yang melebihi batas kuota pendakian dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kawasan Konservasi TWA Gunung Marapi yang akhirnya dapat merusak potensi TWA Gunung Marapi sebagai lokasi ekowisata. Contohnya sampah menumpuk, pembukaan arel untuk perkemahan, kotor nya mata air dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan kawasan TWA Gunung Marapi, BKSDA Sumatera Barat menetapkan Kuota pendakian Di TWA Gunung Marapi sebanyak: hari biasa sebanyak 100 org/hari dan weekend sebanyak 150/hari. Adapun biaya tiket masuk kawasan objek wisata pendakian :

Tabel 1.3 Biaya Tiket PNBP/Orang Pendakian Gunung Marapi 2022

No	Kategori Pendaki	Tiket PNBP	Total
1	Pendakian Umum 2 Hari 1 Malam (Hari Biasa)	Rp. 5000 / Perhari	Rp. 10.000
2	Pendakian Umum 2 Hari 1 Malam (Hari Libur)	Rp. 7.500 / Perhari	Rp. 15.000
3	Rombongan Pelajar Minimal 10 Orang, 2 Hari 1 Malam (Hari Biasa)	Rp. 3.000 / Perhari	Rp. 6.000
4	Rombongan Pelajar Minimal 10 Orang, 2 Hari 1 Malam (Hari Libur)	Rp. 4.500 / Perhari	Rp. 9.000
5	Wisatawan Mancanegara 2 Hari 1 Malam (Hari Biasa)	Rp. 100.000 / Perhari	Rp. 200.000
6	Wisatawan Mancanegara 2 Hari 1 Malam (Hari Libur)	Rp. 150.000 / Perhari	Rp. 300.000

Sumber: (Arsip Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat, 2022) 2022

Gambar 1. E-Tiket Pendakian Gunung Marapi



Sumber: Instagram Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, 2022

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatra Barat juga memberlakukan sebuah sistem baru terkait dengan registrasi masuk objek wisata pendakian yaitu menggunakan sistem e-ticket bagi para pengunjung melakukan pendakian ke taman wisata alam (TWA) Gunung Marapi. Untuk pendakian ke TWA Gunung Marapi, pengunjung harus mendaftar secara online untuk mendapat tiket. Pemberlakuan e-ticket ini bertujuan untuk mempermudah pendataan pengunjung, akuntabilitas pengelolaan pendakian dan mempermudah pengunjung melakukan pendaftaran.

Sistem pendakian booking online ini merupakan kerja sama PT Semen Padang dengan BKSDA Sumbar tentang Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Terusan Arau Hilir. Ada tiga ruang lingkup dari perjanjian kerja sama dengan BKSDA Sumbar ini. Pertama, adalah dukungan kerja sama perlindungan kawasan. Kedua, dukungan kerja sama pengawetan flora dan fauna. Kemudian ruang lingkup yang ketiga, adalah dukungan kerja sama penguatan kelembagaan. salah satu dari poin penguatan kelembagaan ini adalah dukungan penambahan fitur dan peningkatan kapasitas website.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang dipaparkan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan dalam pengelolaan objek wisata pendakian gunung Marapi oleh masing-masing kepengurusan. Pokdarwis dalam pengelolaannya masih melanjutkan sistem yang telah ada pada saat objek wisata masih di kelola oleh masyarakat lokal. Sistem tersebut mencakup tata cara registrasi serta pengadaan fasilitas untuk pendaki. Dari segi pengadaan fasilitas Pokdarwis hanya merenovasi fasilitas yang telah ada. Selama periode kepengurusan 2016-2021 Pokdarwis rutin melakukan kegiatan aksi bersih setiap tahunnya. Untuk kepengurusan BKSDA tahun 2022 banyak melakukan pembaruan terhadap sistem pengelolaan yang sebelumnya di terapkan Pokdarwis, salah satunya dengan merubah tata cara registrasi pendaki. BKSDA menerapkan sistem online dengan tujuan memudahkan pendaki serta memudahkan pihak posko dalam pendataan pengunjung gunung Marapi. Uang registrasi yang di pungut juga memiliki rincian yang jelas. BKSDA juga menerapkan aturan baru yaitu adanya sistem kuota untuk jumlah pendakian yang di perbolehkan dalam satu hari, batas waktu pendakian serta Pendakian tidak boleh dilakukan di malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat.* (2022).
- Arsip Kelompok Sadar Wisata Koto Baru.* (2021).
- Ciko, V. (2022). *Wawancara dengan kepala resort KSDA Bukittinggi* [Komunikasi pribadi].
- Fatimah, A. (2017). *Potensi Wisata Minat Khusus di Jalur Pendakian Sapuangin*

Taman Nasional Gunung Merapi, Tegalmulyo, Kemalang, Klaten. 2.

Humaini, I. (2021). *Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Alam Gunung Sasak Sebagai Aset Wisata Desa Kuripan.*

Hutabarat, H. (2019). *Perkembangan Wisata Mendaki di Gunung Agung: Studi Kasus Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. 7.*
<https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2019.v07.i02.p02>

Idrianto, R. (2022). *Wawancara dengan sekretaris kelompok sadar wisata batu palano [Komunikasi pribadi].*

Jusmar, A. (2019). *Inventarisasi dan Verifikasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Marapi.*

Mutaqin, A. Z. (2020). *Jelajah kawasan pariwisata curug panjang dalam wisata minat khusus. highland indonesia group.*

Nurullah, N. (1999). *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau.* PT Singgalang Press.

Rachman, E. (2022). *Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Kelestarian Kawasan Jalur Pendakian Gunung Singgalang Via Pandai Sikek.*

Sancahyo, G. (2021). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Wisata Minat Khusus Pendakian Gunung di D.I.Y dan Jawa Tengah Dengan Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) Berbasis Android.*

Sapardi, S. (2021). *Analisis Dampak Pengelolaan Wisata Minat Khusus Terhadap Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Nagari Air Batumbuk Kabupaten Solok (Studi Kasus Objek Pendakian Gunung Talang Melalui Jalur Air Batumbuk.*

Zahira, D. (2022). *Gunung Marapi resmi miliki jalur pendakian proklamator. Barat.*